

Intervensi Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam Penanganan dan Penanggulangan Masalah Stunting di Kabupaten Sumedang

Allyah Nur Rahmani¹, Syaira Diasyifa Herlambang²

Najwa Auliya Syarifah³, Iyep Saefulrahman⁴

^{1,2,3,4}Universitas Padjadjaran

allyah23001@mail.unpad.ac.id¹, syaira23001@mail.unpad.ac.id²

najwa23021@mail.unpad.ac.id³, sef73rahman@gmail.com⁴

ABSTRACT

Stunting is a developmental disorder that occurs in children. This usually occurs when children are chronically malnourished during the child's growth period. Usually children who get symptoms of stunting will look proportional, but when children affected by stunting are next to children of the same age, children affected by stunting will look shorter or smaller. Even so, children who look short or small do not necessarily suffer from stunting. Children with stunting will experience poor growth and development, not only from their height that looks short, but the child's intelligence will also weaken, there will be interference when speaking, and it will be difficult when the child learns later; besides that, their immunity is classified as lower, which will be easily exposed to viruses and bacteria. The purpose of this study is to understand how the intervention of the Sumedang Regency government, especially the Health Office, Social Service, and DPPKBP3A of Sumedang Regency, contributes to handling and overcoming stunting cases in Sumedang Regency. The method used in this research is a descriptive qualitative method and literature study. The results of the research obtained are various information about the prevention and handling of stunting carried out by various related fields, both in the Health Office, Social Service, and DPPKBP3A, then the efforts and challenges faced by the agencies, and the most important thing is the source of funds in the framework of handling and overcoming stunting in Sumedang Regency. So it can be concluded that these agencies have an important role to deal with the problem of stunting and reduce the stunting rate in the Sumedang district in various ways.

Key Word : Stunting, Children, Sumedang, Health Office, Social Office, DPPKBP3A

ABSTRAK

Stunting adalah suatu gangguan tumbuh kembang yang terjadi kepada anak-anak. Hal ini biasanya muncul ketika anak kekurangan gizi kronis pada periode pertumbuhan anak. Biasanya anak yang mendapat gejala stunting akan terlihat proporsional, namun saat anak yang terkena stunting dibandingkan dengan anak seumurannya, anak yang terkena stunting akan terlihat lebih pendek atau kecil. Walaupun begitu, anak-anak yang terlihat pendek atau kecil itu belum tentu menderita stunting. Anak penderita stunting akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan anak akan buruk, bukan hanya dari tinggi badannya saja yang terlihat pendek, tetapi kepintaran sang anak juga akan melemah, terjadinya gangguan saat berbicara, serta akan kesulitan saat sang anak belajar nantinya, selain itu kekebalan tubuhnya tergolong lebih rendah yang akan gampang terkena virus dan bakteri. Tujuan dari penelitian ini agar memahami bagaimana intervensi pemerintah Kabupaten Sumedang khususnya Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan DPPKBP3A Kabupaten Sumedang ikut andil dalam menangani dan menanggulangi kasus stunting di Kabupaten Sumedang. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dan studi literatur. Hasil penelitian yang didapatkan adalah berbagai informasi tentang penanggulangan dan penanganan stunting yang dilakukan berbagai bidang terkait baik di Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan DPPKBP3A, kemudian upaya dan tantangan yang dihadapi oleh dinas-dinas, serta yang paling penting adalah sumber dana dalam rangka terkait penanganan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Sumedang. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa dinas-dinas tersebut memiliki peran penting untuk menangani masalah

stunting dan menurunkan angka stunting di kabupaten Sumedang dengan berbagai cara yang dilakukan.

Kata kunci : Stunting, anak, kabupaten Sumedang, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DPPKB3A

PENDAHULUAN

Stunting pada anak-anak adalah salah satu masalah kesehatan yang muncul di Indonesia. Stunting adalah masalah kesehatan yang serius karena dikaitkan dengan risiko sakit dan kematian yang lebih tinggi, obesitas, penyakit tidak menular, orang dewasa yang pendek, kurangnya produktivitas, dan perkembangan kognitif yang buruk. Dengan demikian, stunting akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masa depan (Paramashantiet al.,2016). Stunting menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan ke-2 istilahnya adalah salah satu target Sustainable Development Goals (SDGs) dengan menghilangkan kelaparan dan berbagai bentuk malnutrisi pada tahun 2030 serta memperoleh ketahanan pangan. Apabila dilansir dari Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI, 2018 bahwa rencana penurunan angka stunting hingga 40% menjadi target yang ditetapkan pada tahun 2025.

Faktanya, stunting didefinisikan sebagai kondisi di mana tinggi badan individu pada usia tertentu kurang dari dua standar deviasi yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (Setiawan et al., 2018). Menurut Riset Kesehatan Dasar Kemenkes, jumlah balita di Indonesia mencapai 30,7% atau 8,7 juta pada tahun 2018. Ini lebih tinggi dari target 20% yang ditetapkan WHO. Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan hal ini dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020–2024, yang dirancang untuk mengurangi tingkat hambatan (Priyono, 2020).

Sebagai negara, Indonesia bertanggung jawab untuk melindungi semua orang, termasuk bayi dan bayi baru lahir, sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa "Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia." Oleh karena itu, angka harapan hidup untuk bayi dan ibu melahirkan adalah salah satu indikator yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan jika angka kematian bayi atau ibu melahirkan meningkat, IPM akan terus menurun. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan jaminan di segala bidang.

Pada negara berkembang seperti Indonesia, tingkat kemiskinan dan pendapatan mempunyai dampak yang signifikan terhadap angka stunting. Seribu hari pertama kehidupan (1.000 HPK) mengacu pada gizi dan kesejahteraan anak balita (Priyono, 2020). Kemiskinan dan tingkat pendapatan sangat mempengaruhi tingkat stunting di negara berkembang seperti Indonesia. Kesejahteraan dan gizi anak-anak di bawah usia lima tahun disebut sebagai seribu hari pertama kehidupan (1.000 HPK) merupakan masa penting sebagai penentu kehidupan di kemudian hari, sehingga penting adanya pertimbangan preventif untuk mencegah gangguan bayi (Priyono, 2020).

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi provinsi, yang kemudian dibagi menjadi kabupaten dan kota, masing-masing dengan pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang. Pasal 18 ayat (2) dan (5) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa setiap pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menetapkan undang-undang. Sehingga ketentuan tersebut menjadi latar belakang munculnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda) yang memuat klasifikasi urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan umum. Pengaturan regulasi melalui Undang-Undang Pemerintah Daerah (UU Pemda) menetapkan urusan kesehatan yang menjadi otoritas pusat dan daerah sehingga peraturan tersebut menjadi pedoman untuk mewujudkan masyarakat sehat yang merata di daerah.

Pemerintah daerah memiliki tugas atau kewenangan untuk memberikan perhatian dan prioritas terhadap gizi masyarakat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Permasalahan gizi pada masyarakat terutama akan berpengaruh pada tumbuh kembang masyarakat. Melalui penelitian Anggita, Sakti (2020) tentang Pengaruh Stunting Pada Tumbuh Kembang Anak Periode *Golden Age*, bahwa stunting akan memperlambat kemampuan motorik kasar dan halus pada anak, sehingga perkembangan otak pada anak di periode *Golden Age* menjadi kurang optimal. Sehingga terdapat sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 untuk menurunkan prevalensi stunting hingga 14% di tiap kabupaten/kota.

Strategi Nasional (Stranas) juga didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang telah diberlakukan sejak tahun 2018. Selain itu, Perpres ini berfungsi untuk memperkuat kerangka intervensi yang harus dilakukan dan kelembagaan dalam melaksanakan percepatan penurunan stunting. Tujuannya untuk melihat dan mempertimbangkan bahwa angka stunting di masyarakat dinilai semakin tinggi, sehingga Peraturan Presiden ini diharapkan dapat memberikan perhatian lebih kepada pemerintah daerah terkait pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting khususnya di wilayah Kabupaten Sumedang.

Regulasi strategi pemerintah provinsi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting memiliki tujuan untuk menurunkan prevalensi stunting di kabupaten dan kota di Indonesia sebesar 14% sebelum tahun 2024. Regulasi provinsi Jawa Barat ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 107 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Daerah Provinsi Jawa Barat dalam hal tanggung jawab dari Percepatan Penurunan Stunting yang merupakan tanggung jawab dari perangkat daerah yang mengurus urusan pemerintahan daerah sesuai kewenangannya.

Kabupaten Sumedang juga memiliki Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2019 yang berisi Tentang Percepatan Penurunan Dan Pencegahan Stunting Terintegrasi. Pemerintah Kabupaten Sumedang telah berupaya untuk mengoptimalkan penanganan stunting melalui program yang telah ditetapkan hingga alokasi pendanaan untuk penurunan stunting di daerah tersebut. Strategi untuk mengurangi angka stunting dilakukan dengan sinergi mulai dari pemerintah desa bahkan komitmen yang kuat terhadap pelaksanaan kebijakannya.

Kasus stunting Kabupaten Sumedang pada tahun 2018 yang sempat menyentuh angka 32% menjadi motivasi bagi pemerintah Kabupaten Sumedang untuk menekan angka stunting di daerahnya. Pada tahun 2018 terdapat 32 dari 100 bayi di Kabupaten Sumedang yang terkena stunting. Pemerintah dimotivasi untuk meningkatkan kemajuan

pembangunan di Kabupaten Sumedang, terutama dalam bidang kesehatan, karena angka stuntingnya yang tinggi. Saat ini, Kabupaten Sumedang memberikan program pencegahan stunting kepada semua desa di daerah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kebijakan pemerintah daerah di Kabupaten Sumedang dalam hal penanggulangan dan penanganan stunting.

METODE PENELITIAN

Peneliti memakai metode deskriptif kualitatif dan metode studi literatur (*literature review*). Menurut Denzin serta Lincoln, penelitian kualitatif adalah penelitian yang memakai latar alamiah dengan tujuan menafsirkan sebuah fenomena yang terjadi dan dilaksanakan dengan jalan yang melibatkan berbagai metode yang ada. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang penting untuk memahami sebuah fenomena sosial dan perspektif individu yang sedang diteliti. Pendekatan kualitatif pun merupakan yang dimana prosedur penelitiannya menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata yang secara tertulis maupun dengan lisan dari perilaku orang-orang yang diamati.¹ Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai penanganan dan penanggulangan pemerintah Kabupaten Sumedang mengenai masalah stunting di daerahnya. Informan yang kami pilih dalam penelitian kali ini diantaranya adalah Dinas Sosial Kabupaten Sumedang, Bidang Keluarga Sejahtera Dinas DPPKBP3A, dan Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang.

Peneliti juga memakai teknik data sekunder untuk mengumpulkan data dengan memakai metode studi literatur atau *literature review*. Menurut Hasby (2017) dalam Parinata & Puspaningtyas studi literatur adalah metode yang dipakai untuk mengumpulkan data atau sumber-sumber yang relevan dengan topik yang akan dibahas oleh peneliti. Studi literatur ini meliputi berbagai sumber akademik, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, serta laporan yang relevan dengan topiknya. Data sekunder yang diperoleh melalui hasil studi literatur atau *literature review* melalui sumber internet, situs resmi pemerintah, arsip pemerintah, dan hasil riset yang sudah ada. Pendekatan studi literatur ini memiliki tujuan untuk memberikan sebuah pemahaman yang lebih mendalam terhadap gejala stunting di Kabupaten Sumedang. Adapun untuk data primer yang kami peroleh berdasarkan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dimaksud berfungsi untuk menyelesaikan masalah penelitian secara keseluruhan. Hal pertama yang dilakukan dengan melakukan analisis data, termasuk pengumpulan data, menyusun secara sistematis, dan membuat kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang Dalam Upaya Penanganan dan Penanggulangan Stunting

Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018 menunjukkan bahwa terdapat 2 provinsi yang mempunyai prevalensi stunting di atas 40% sehingga hal tersebut digolongkan sangat

¹ Wahyuni, Pengembangan Koleksi Jurnal studi Kasus di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga. <http://diglib.uin-suka.ac.id/12295/2/BAB/20V/pustaka.pdf> , yogyakarta 2013.hal.20

tinggi dan terdapat 18 provinsi yang mempunyai prevalensi stunting antara 30-40% yang tergolong tinggi. Persentase tersebut mengindikasikan bahwa terdapat kasus kekurangan gizi akut yang angkanya besar dengan resiko kematian 10 kali lebih besar dibandingkan dengan anak normal. Maka dari itu ditetapkan dan ditentukan bahwa terdapat 100 kabupaten/kota yang menjadi fokus pemerintah sebagai prioritas percepatan pencegahan stunting. Kabupaten Sumedang menjadi salah satu dari 100 kabupaten/kota dengan prioritas percepatan pencegahan stunting. Hal tersebut bukanlah tanpa alasan, sebab angka kasus stunting Kabupaten Sumedang pada tahun 2018 sebesar 32,2% yang mengartikan bahwa dari 100 balita di Kabupaten Sumedang, 32 diantaranya terkena stunting. Oleh karena itu, berbagai usaha dilakukan oleh Kabupaten Sumedang dengan melibatkan berbagai pihak sebagai upaya percepatan penurunan stunting, salah satunya adalah Dinas Kesehatan.

Usaha percepatan penurunan stunting tertuang ke dalam Rencana Strategis (Renstra) daerah tersebut yang didorong dengan dukungan anggaran yang diberikan oleh kementerian. Sehingga untuk aturan sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diatur berdasarkan prioritas, kemudian terdapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diberikan oleh provinsi berdasarkan usulan dari kabupaten/kota, dan terdapat anggaran dari daerah kabupaten yang diberikan melalui pemetaan kegiatan, serta sisanya berasal dari dinas masing-masing yang melaksanakan program sesuai dengan kewenangan dan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Sejak saat itu, Kabupaten Sumedang mulai memperbaiki sumber daya manusia dan data yang mereka miliki. Berbagai usaha sejak tahun 2018 telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumedang dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Peraturan Bupati Nomor 405 Tahun 2022 sehingga pada akhirnya pada tahun 2023 prevalensi stunting di Kabupaten Sumedang turun menjadi 14,4%. Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang memiliki beberapa bidang yang di dalamnya melakukan perencanaan dan pelaksanaan sebagai bentuk upaya pencegahan dan penurunan stunting. Namun dari semua perencanaan dan kegiatan tersebut, terdapat *leading sector* yaitu Bidang Kesehatan Masyarakat tepatnya Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi.

Terdapat dua intervensi gizi yang dilaksanakan Kabupaten Sumedang, intervensi gizi spesifik menjadi usaha pertama yang dilakukan dengan mengacu pada 11 indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yaitu 1) Remaja putri menjalani skrining anemia; 2) Remaja putri mengkonsumsi Tablet Tambah Darah; 3) Ibu hamil menjalani pemeriksaan kehamilan ANC (*antenatal care*); 4) Ibu hamil mengkonsumsi Tablet Tambah Darah selama kehamilan; 5) Ibu Hamil KEK (Kurang Energi Kronik) mendapat tambahan asupan gizi; 6) Pemantauan pertumbuhan balita; 7) Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif; 8) Anak usia 6-23 bulan mendapat MP-ASI (makanan pendamping ASI); 9) Balita gizi kurang mendapatkan tambahan asupan gizi; 10) Bayi memperoleh imunisasi dasar lengkap; dan 11) Desa bebas dari BABS (Buang Air Besar Sembarangan). Adapun intervensi gizi sensitif yang dilaksanakan berupa edukasi dan sosialisasi secara masif mengenai 11 sasaran tersebut, pelatihan sumber daya manusia yang tidak hanya dilakukan pada tenaga kesehatannya saja tetapi juga diberikan pelatihan dan

pendampingan kepada para Kader dengan melakukan workshop dan jambore yang berkaitan dengan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sumedang.

Sebagai bentuk upaya penanganan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sumedang, Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan melaksanakan beberapa program sebagai berikut :

- a. Pemberian makanan tambahan bagi balita risiko stunting dan ibu hamil KEK;
- b. Pemberian 2 buah telur kepada ibu hamil setiap harinya untuk dikonsumsi;
- c. Pemantauan kesehatan ibu hamil melalui smart watch sehingga mulai dari bidan bahkan pemerintah daerah sekalipun dapat memantau tekanan darah dan hal lainnya terkait kesehatan ibu hamil tersebut;
- d. Pembentukan Tim Buser (Mil) yang bertugas mendampingi ibu hamil untuk mencegah kematian ibu dan bayi serta stunting; dan
- e. Pengawasan, pemeriksaan kesehatan, dan pemberian Tablet Tambah Darah selama 3 bulan sebelum pernikahan.

Seluruh program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang dinilai berdasarkan indikator keberhasilan yang dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran bulanan berdasarkan permasalahan gizi yang diukur setiap bulan Februari dan Agustus. Adapun bulan Agustus sendiri disebut sebagai Bulan Penimbangan Balita yang hasil perhitungannya digunakan sebagai acuan keberhasilan untuk tahun selanjutnya. Monitoring dan Evaluasi juga dilakukan secara nasional melalui survey yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan secara keseluruhan mengenai status gizi yang hasilnya digunakan sebagai acuan menentukan kebijakan dalam konteks kesehatan. Dinas Kesehatan khususnya Bidang Kesehatan Masyarakat juga turut melakukan monitoring dan evaluasi kepada setiap puskesmas, posyandu, desa ataupun adanya rapat evaluasi. Kemudian pihak Bidang Kesehatan Masyarakat juga rutin melakukan evaluasi kepada Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang berada di wilayah desa dan kecamatan.

Pada akhirnya, meskipun leading sector percepatan penurunan stunting Dinas Kesehatan berada pada Bidang Kesehatan Masyarakat namun perlu adanya dukungan dari berbagai pihak dan instansi baik itu pemerintah maupun masyarakat yang dapat mendukung dan mendorong berbagai program tersebut. Kolaborasi diperlukan baik dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pihak swasta (akademisi, Telkomsel, Program Bisa, dan lainnya), dan Organisasi Perangkat Daerah seperti a) Dinas Kesehatan, b) Bappeda, c) Sekretariat Daerah, d) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, e) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, f) Dinas Peternakan dan Perikanan, g) Dinas PUPR, h) Dinas Sosial, i) Dinas Pendidikan, j) Dinas Komunikasi dan Informatika, k) DPPKBP3A, l) Kementerian Agama, dan lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara kami dengan Ibu Drg. Hana Zaitunah Fuadi selaku Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, dapat disimpulkan bahwa melonjaknya angka stunting di Kabupaten Sumedang pada tahun 2018 menjadi tahun permulaan yang memerlukan banyak persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan hal lainnya sebagai upaya percepatan penanganan stunting di daerah tersebut. Usaha yang dilakukan meliputi intervensi gizi spesifik dan sensitif serta berbagai program yang diluncurkan oleh Dinas Kesehatan memberikan hasil signifikan dengan capaian angka

stunting pada tahun 2023 menurun menjadi 14,4% yang menunjukkan adanya kesungguhan Pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan stunting ini. Selain program yang diluncurkan oleh Dinas Kesehatan, masalah stunting ini bukan hanya menjadi persoalan atau sebuah masalah bagi kesehatan saja, namun perlu adanya kolaborasi antara berbagai instansi pemerintah dan masyarakat termasuk sektor swasta yang dirasa sangat penting dalam mendukung keberhasilan program ini. Hingga pada akhirnya dari banyaknya pencapaian dan kolaborasi yang dilakukan Dinas Kesehatan perlu adanya monitoring dan evaluasi sebagai bentuk usaha untuk memastikan bahwa setiap program dan kebijakan yang dilaksanakan atau dikeluarkan dapat memberikan hasil yang baik untuk masyarakat dan sekitar.

2. Peran Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Dalam Upaya Penanganan dan Penanggulangan Stunting

Dinas Sosial merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki peran dalam pencegahan dan penurunan stunting sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 107 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Daerah Provinsi Jawa Barat Pasal 6 yang menyebutkan Percepatan penurunan stunting dilaksanakan oleh Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan daerah. Dinas Sosial memiliki program yang berkaitan langsung dengan pencegahan dan penanganan stunting, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program ini merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin. PKH bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dan bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. Sasaran dari program ini merupakan keluarga miskin yang memiliki komponen seperti ibu hamil, balita, anak sekolah, lansia yang tidak produktif, dan penyandang disabilitas. Dalam penanganan stunting, program ini memiliki andil untuk pembiayaan transport keluarga ibu hamil sehingga ibu hamil dipastikan dapat memiliki akses ke fasilitas kesehatan meskipun jarak yang jauh, sehingga bayi yang berada dalam kandungan dapat terpantau dengan baik. Begitu pula untuk balita, PKH hadir sebagai untuk pembiayaan transport menuju fasilitas kesehatan hingga anak mendapatkan imunisasi secara lengkap dan tidak terkendala. Program PKH ini bersentuhan langsung terhadap pencegahan stunting dan kemiskinan karena diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan keluarga dengan lahirnya anak yang sehat, dapat mendapatkan pendidikan, hingga bekerja sehingga meningkatkan taraf hidup keluarga.

PKH ini menggunakan sistem 'tambal sulam' dimana dikarenakan keterbatasan kuota yang diberikan oleh pusat sehingga calon penerima akan masuk ke dalam daftar tunggu untuk menerima bantuan. Dilansir dari sumedangkab.go.id, terdapat 54.728 Kartu Keluarga yang mendapatkan bantuan program PKH di Kabupaten Sumedang tahun 2024 dengan total bantuan sebesar Rp 97,1 milyar lebih. Angka ini mengalami penurunan dimana pada tahun 2023, penerima bantuan PKH Kabupaten Sumedang berada di angka 56.000 Kartu Keluarga. Calon penerima akan mendapatkan bantuan PKH apabila penerima PKH yang terdaftar meninggal dan tidak memiliki ahli waris, penerima pindah keluar kabupaten,

sudah tidak ada sasaran dalam Kartu Keluarga-nya, atau ada yang mengundurkan diri karena sudah mampu. Tiap-tiap desa memiliki operator masing-masing untuk mengelola dan mengajukan data penerima bansos ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui Aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kementerian Sosial - New Generation. Nama-nama yang diajukan kepada operator desa merupakan hasil forum yang dilakukan dan disepakati dalam musyawarah desa yang dihadiri oleh Karang Taruna, RT, RW, dan lain sebagainya. Kerap kali bantuan sosial ini dinilai tidak tepat sasaran, padahal jika diulik permasalahannya, terdapat beberapa desa yang tidak melakukan verifikasi ulang dan musyawarah terhadap penerima yang sudah mampu dan stabil sehingga penerima tidak terkontrol dan tidak tepat sasaran.

3. Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A)

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau yang sering didengar dengan DPPKBP3A, mereka memiliki peran yang penting dalam penanggulangan dan penanganan stunting di Kabupaten Sumedang. DPPKBP3A membidik target penurunan stunting di Kabupaten Sumedang memakai dua cara, yaitu inovasi dan kolaborasi.

Dalam inovasi, dibagi lagi menjadi dua yaitu kelitbangan dan teknologi. Kelitbangan adalah memakai sebuah penelitian dan kajian, biasanya kajian dan penelitian tersebut dari berbagai perguruan tinggi atau dari BAPPEDA dikarenakan DPPKBP3A sering bekerja sama dengan berbagai pihak tersebut. Hasil dari penelitian dan kajian tersebut, oleh DPPKBP3A akan dijadikan sebagai sebuah bahan rekomendasi untuk DPPKBP3A sendiri dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Sumedang. Dan untuk teknologi, DPPKBP3A memakai beberapa aplikasi yang memang sudah tersedia untuk bisa mengetahui data-data tentang permasalahan stunting, aplikasi yang dipakai yaitu : 1) Simpati, aplikasi Simpati ini merupakan aplikasi pertama yang diluncurkan oleh Kabupaten Sumedang yang berkolaborasi dengan pihak swasta, yaitu Telkomsel. Aplikasi ini bekerja untuk mengumpulkan dan pelaporan data tentang semua permasalahan stunting, 2) Sakit Desa, aplikasi Sakit Desa ini merupakan inovasi dari DPPKBP3A, aplikasi ini memiliki tiga indikator yang dibidik yaitu kemiskinan, stunting, dan pelayanan publik. 3) SiMurni (Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Ibu Hamil dan Remaja Putri), SiMurni ini berfokus hanya kepada ibu hamil dan remaja putri, tetapi yang baru terlaksanakan hanya untuk ibu hamil saja. Cara kerja aplikasi ini dengan adanya sebuah smartwatch yang diberikan kepada ibu hamil, lalu smartwatch ini disambungkan kepada aplikasi PSC Dinas Kesehatan. Dengan memakai smartwatch tersebut, nanti akan terlihat jika ibu hamil tersebut memiliki resiko, dan nanti ada tim yang akan mendatangi ibu hamil tersebut atau ibu hamilnya yang datang langsung ke pihak pelayanan fasilitas kesehatan. 4) SiCakep, aplikasi ini merupakan kolaborasi dengan Si Murni, aplikasi ini merupakan tempat data-data ibu hamil yang memiliki resiko, lalu akan dikaitkan dengan smartwatch tersebut. Dan untuk kolaborasi itu ada dua cara, yaitu mobilisasi dan orkestrasi.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) sendiri memiliki beberapa kegiatan untuk penanggulangan dan penanganan stunting di Kabupaten Sumedang, yaitu :

- a. Tim Pendamping Keluarga (TPK), terbentuknya TPK ini bertujuan untuk menurunkan angka stunting dan TPK sudah tersebar di berbagai desa dan kelurahan di wilayah Kabupaten Sumedang. TPK ini pun memiliki tiga unsur yaitu Kader Keluarga Berencana (KB), Kader PKK, dan Bidan Desa. TPK ini diberi tugas untuk mendampingi sasaran dari program stunting di Kabupaten Sumedang ini, sasarannya dimulai dari pasangan usia subur, ibu hamil, pasca salin, baduta dan balita. Serta tugas lainnya adalah melaksanakan pengawasan dan memberikan edukasi kepada kelompok sasaran tersebut untuk mencegah terjadinya stunting pada anak serta melaporkan jika terjadi ada permasalahan yang memang harus ditindak lanjuti oleh pihak TPK.
- b. Bina Keluarga Balita (BKB), Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Sumedang melaksanakan kegiatan ini tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kesadaran orang tua terutama sang ibu agar keluarganya dapat membina pertumbuhan sang balita serta merawat balita dengan baik dengan memberikan gizi yang cukup agar balita terhindar dari stunting. serta membina pertumbuhan sang balita melalui dengan memberikan rangsangan fisik, motorik, kepiintaran, sosial, emosional, dan moral yang sedang berlangsung saat proses interaksi antar ibu atau keluarga lainnya dengan anak balitanya.
- c. Bina Keluarga Remaja, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Sumedang meluncurkan kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan dan meningkatkan pemahaman, sikap, serta keterampilan yang lebih mendalam kepada orangtua dan keluarganya tentang seberapa pentingnya pemenuhan gizi bagi anaknya yang masih remaja agar mencegah dan terhindar dari anemia serta masalah stunting untuk anaknya di waktu yang akan datang. Jika gizinya tidak terpenuhi dan pola makannya tidak benar, remaja putri kemungkinan akan terkena anemia, salah satu faktor anak stunting itu adalah ibunya yang melahirkan terkena penyakit anemia, maka perlu sekali untuk menjaga pola makan dan gizi agar bisa terhindar dari hal tersebut. Pembinaan keluarga remaja ini dilaksanakan melalui program Generasi Berencana atau GenRe. Dimana program ini dilakukan dalam dua pendekatan, yaitu pendekatan kepala keluarga yang mempunyai remaja, melalui BKR serta melalui PIK-R.

Melalui berbagai pemberian edukasi serta pendampingan yang sudah dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DPPKBP3A dalam kegiatan diatas. TPK, BKB, dan BKR ini memiliki tujuan untuk mencegah angka stunting di Kabupaten Sumedang serta memberikan arahan kepada orangtua anggota keluarga lainnya untuk dapat lebih paham dan terampil dalam membina anak balita serta anak remajanya agar terhindar dari masalah stunting di masa yang akan datang nanti.

4. Sumber Dana Dalam Penanganan dan Penanggulangan Stunting Kabupaten Sumedang

Alokasi belanja negara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu faktor pendukung dan penentu pencapaian tujuan pembangunan Indonesia. Setiap tahunnya negara akan membuat suatu anggaran belanja untuk mengalokasikan pendapatan negara ke dalam pos pos belanja dalam bentuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Belanja pemerintah pusat dalam APBN dibagi ke dalam 3 (tiga) bagian, yaitu menurut fungsi, organisasi, dan program. Berdasarkan fungsinya, belanja memiliki 11 fungsi yang didalamnya terdapat fungsi kesehatan. Belanja kesehatan dalam APBN setiap tahunnya dialokasikan sebesar 5% dari keseluruhan belanja negara di luar belanja pegawai sebagaimana tercantum pada Pasal 171 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Salah satu program prioritas fungsi kesehatan ialah percepatan penurunan stunting. Dalam upaya menurunkan angka stunting, banyak program-program yang diluncurkan oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Sumber dana program-program ini berasal dari APBN, APBD, dan DAK.

Kabupaten Sumedang dalam Perda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, menganggarkan sebesar 23 miliar untuk penanganan dan penanggulangan stunting yang terbagi menjadi beberapa pos dan kode rekening. Selain itu, salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam rangka menekan angka stunting adalah dengan melaksanakan kolaborasi menggunakan metode *pentahelix* dalam percepatan penurunan stunting. Pelaksanaan komitmen penurunan angka stunting menggunakan metode *pentahelix* ini memungkinkan 5 (lima) unsur untuk saling bersinergi dalam pemaksimalan pemberian pelayanan kesehatan. Kelima unsur tersebut meliputi unsur Pemerintah Daerah (OPD terkait), unsur media, unsur *civil society* (masyarakat), unsur pendidikan, dan unsur organisasi profesi/bisnis. Penggunaan metode *pentahelix* ini juga menjadi salah satu sumber dana bagi Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam pemenuhan pendanaan program-program penanganan dan penanggulangan stunting. Salah satunya seperti kolaborasi yang dilakukan dalam aplikasi Simpati bersama program CSR Telkomsel.

5. Faktor Pendukung Upaya Penanganan dan Penanggulangan Stunting Kabupaten Sumedang

Kabupaten Sumedang secara signifikan berhasil menurunkan angka stunting di daerahnya yang semula pada tahun 2018 berada prevalensi stunting mencapai 32,2% dan pada tahun 2023 berhasil menurun hingga ke angka 7,89%. Hal ini membuktikan bahwa adanya kerja keras dan kolaborasi yang dilakukan berbagai pihak sebagai bentuk usaha menurunkan angka stunting di Kabupaten Sumedang. Setiap tahunnya Kabupaten Sumedang selalu mengadakan rembug stunting yang melibatkan berbagai komponen untuk berkomitmen bersama membulatkan niat dan tekad untuk menjadi solusi mengatasi stunting. Terdapat 8 Pelaksanaan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting diantara melalui pendekatan budaya, teknologi, agama, dan kerjasama *pentahelix* (pemerintah, akademisi, komunitas, pengusaha, dan media). Kabupaten Sumedang juga membentuk Tim Percepatan

Penurunan Stunting (TPPS) bersama seluruh komponen masyarakat juga berkolaborasi dengan LLDikti wilayah 4 berupa Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik gotong royong membangun desa yang salah satu indikatornya menangani masalah stunting. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang juga meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Kesehatan Remaja Putri dan Ibu Hamil (SINURMI), yang digunakan oleh penggunanya sebagai alat pendeteksi tekanan darah, detak jantung, saturasi, lokasi, jumlah langkah maupun lokasi ibu hamil sebagai upaya deteksi dini penanganan dan pencegahan stunting pada ibu hamil.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang juga telah mengembangkan aplikasi Simpati (Sistem Informasi Pencegahan Stunting Terintegrasi) sebagai upaya penanganan permasalahan stunting di Kabupaten Sumedang. Kehadiran inovasi ini merupakan usaha modern yang diberikan oleh pemerintah dengan peluncuran resmi nya pada tanggal 30 September 2020 oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Bappppeda) Kabupaten Sumedang yang bekerja sama dengan penyedia layanan aplikasi dan sarana prasarana pelaksanaan program yaitu Telkomsel.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang juga telah mengembangkan aplikasi Simpati (Sistem Informasi Pencegahan Stunting Terintegrasi) sebagai upaya penanganan permasalahan stunting di Kabupaten Sumedang. Kehadiran inovasi ini merupakan usaha modern yang diberikan oleh pemerintah dengan peluncuran resmi nya pada tanggal 30 September 2020 oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Bappppeda) Kabupaten Sumedang yang bekerja sama dengan penyedia layanan aplikasi dan sarana prasarana pelaksanaan program yaitu Telkomsel.

Melalui penerapan penggunaan aplikasi Simpati sebagai upaya penanggulangan stunting di Kabupaten Sumedang, diharapkan semua pihak yang terlibat mampu memahami strategi mengatasi masalah stunting. Bentuk usaha modern yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Sumedang ini mampu mengantarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang meraih penghargaan tertinggi kategori daerah pada *Digital Government Award - Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2023* yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Jakarta pada 20 Maret 2023 yang lalu. Melalui penghargaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumedang membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi yang baik mampu meningkatkan efektivitas serta efisiensi terhadap pelayanan publik.

Kehadiran Simpati ini memberikan manfaat yang cukup banyak dan dapat dirasakan oleh seluruh pihak terkait, salah satunya adalah memperoleh informasi kesehatan khususnya stunting. Aplikasi ini memudahkan ibu hamil dan juga orang tua untuk mengakses informasi terkait dengan kesehatan serta gizi tanpa perlu menunggu pertemuan secara langsung dengan tenaga kesehatan. Para kader pun turut merasakan manfaatnya melalui pengawasan atas pertumbuhan anak dan melakukan pemberian nutrisi yang sesuai selama masa awal pertumbuhan. Sehingga pada akhirnya, berbagai data dan informasi yang disimpan dalam aplikasi ini dapat menjadi sebuah awal kecil untuk manfaat yang besar bagi proses penanganan stunting khususnya di Kabupaten Sumedang dan

umumnya bagi daerah lain di Indonesia. *Good data, good decision, and good result* untuk Jawa Barat “*Zero New Stunting*”.

6. Tantangan Dalam Upaya Penanganan dan Penanggulangan Stunting Kabupaten Sumedang

Usaha penanggulangan dan penanganan stunting pemerintah daerah di Kabupaten Sumedang, tentu menghadapi berbagai tantangan yang perlu diselesaikan agar bisa mencapai target *zero new stunting*. Walaupun Kabupaten Sumedang ini sudah ada kemajuan yang signifikan, yang sekarang Kabupaten Sumedang menempati posisi keempat terbaik prevalensi stunting di Jawa Barat yang sebelumnya berada di posisi ke 27 se Jawa Barat, tetapi pasti pemerintah daerah memiliki tantangan atau kendala di awal ketika sedang berupaya untuk menurunkan angka stunting Kabupaten Sumedang. Berikut merupakan tantangan atau kendala yang dialami oleh pemerintah daerah di Kabupaten Sumedang :

- a. Ketika Kabupaten Sumedang dinyatakan masuk ke dalam 100 kabupaten/kota tertinggi dalam permasalahan stunting se Indonesia. Karena pemerintah daerah diharuskan mengisi data, data dari tingkat kabupaten atau kecamatan ditemukan, namun data di tingkat desa tidak dapat ditemukan.
- b. Ketika pertama kali diluncurkannya aplikasi Simpati, beberapa petugas cukup kesulitan dikarenakan ada yang masih kurang mampu menggunakan teknologi yang disebabkan oleh faktor usia, maka tim yang lain perlu memandu beberapa orang tersebut agar dapat mengerti untuk bagaimana memakai aplikasi simpati tersebut.
- c. Dalam pelaksanaan program PKH sering kali terjadi perbedaan data antara data Administrasi Kependudukan (Adminduk), DTKS, dan data Bank Penyalur. Kementerian Sosial memiliki alur usulan berasal dari Kabupaten/Kota yang masuk melalui DTKS dan kemudian diolah dan ditetapkan melalui Surat Keputusan. DTKS ini kemudian harus dipadankan dengan Adminduk yang terintegrasi dengan disduk pusat dan juga data dari bank penyalur. Dalam proses penyaluran kepada penerima bantuan, kerap kali ditemukan ketidaksesuaian data antara data satu dan data lainnya sehingga dana tidak tersalurkan kepada penerima padahal sudah tercantum dalam Surat Keputusan.
- d. Masyarakat tidak terdaftar di DTKS. Masyarakat yang mendapatkan bantuan harus terdaftar di DTKS yang dilaporkan oleh operator tiap-tiap desa dengan menginput seluruh persyaratan. Namun yang menjadi kendala ialah kerap kali masyarakat yang selayaknya mendapatkan bantuan tidak terdaftar di DTKS karena persyaratan administrasi yang cukup memakan waktu dan juga pihak desa yang tidak mau mengadakan musyawarah desa untuk membidik ulang sasaran bansos.
- e. Anggaran, anggaran yang diberikan oleh pusat terbilang cukup kurang untuk memaksimalkan semua program atau kegiatan untuk penanggulangan dan penanganan stunting di Kabupaten Sumedang ini, karena kurangnya anggaran yang diberikan, maka para dinas harus memutar otaknya agar anggaran yang sudah diberikan bisa dimaksimalkan agar program-program yang sudah dibentuk bisa berjalan dengan lancar di Kabupaten Sumedang.

Walaupun adanya sebuah kendala atau tantangan dalam upaya penanggulangan dan penanganan stunting di Kabupaten Sumedang ini, pemerintah daerah Kabupaten

Sumedang ini tetap dapat menurunkan prevalensi stunting setiap tahunnya dengan baik, upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh berbagai dinas di Kabupaten Sumedang ini berjalan dengan efektif dan efisien, meskipun ada beberapa kendala atau tantangan di awal seperti anggaran yang didapatkan terbilang kurang untuk menangani masalah stunting ini, tetapi Kabupaten Sumedang dapat memaksimalkan agar program-program tersebut berjalan dengan lancar.

KESIMPULAN

Salah satu urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib bagi pemerintah dalam pelayanan dasar adalah urusan di bidang kesehatan. Otonomi memungkinkan daerah mengurus dan mengatur urusan rumah tangganya sendiri, salah satunya adalah di bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, stunting menjadi salah satu fokus utama pemerintah baik dari pusat hingga ke daerah. Indonesia menunjukkan komitmennya dalam penurunan stunting melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 yang menetapkan penurunan stunting sebagai salah satu Kegiatan Prioritas Nasional. Pemerintah Daerah mempunyai peran yang penting untuk menangani dan penanggulangan stunting, dalam penanganannya pemerintah daerah memerlukan kolaborasi dari berbagai OPD untuk mencapai tujuan bersama. Dinas Kesehatan dalam penurunan stunting melakukan dua intervensi gizi yaitu intervensi gizi spesifik yang mengacu pada 11 indikator yang ditetapkan oleh Kemenkes dan intervensi gizi sensitif yang dilaksanakan berupa edukasi dan sosialisasi secara masif mengenai 11 sasaran tersebut. Dinas Sosial dalam hal ini memiliki peran dalam menunjang kebutuhan transport yang digunakan oleh penerima melalui bantuan sosial secara langsung. Sehingga, sasaran dari program ini tidak terkendala biaya untuk mengakses fasilitas kesehatan sekitar. Dinas Sosial juga memiliki program-program dalam upaya memutus rantai kemiskinan keluarga yang menjadi salah satu faktor terjadinya stunting dengan memastikan sang anak lahir sehat, mendapatkan pendidikan, dan bekerja sehingga dapat meningkatkan taraf hidup keluarga. Disisi lain, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) membidik target penurunan stunting di Kabupaten Sumedang melalui inovasi dan kolaborasi. DPPKBP3A memiliki beberapa kegiatan dalam upaya penanggulangan dan penanganan stunting, seperti Tim Pendamping Keluarga (TPK), Bina Keluarga Balita (BKB), dan Bina Keluarga Remaja. Dalam pendanaan program-program penanganan dan penanggulangan stunting, Kabupaten Sumedang menggunakan metode pentahelix dengan kolaborasi dengan 5 unsur di dalamnya. Dalam pelaksanaannya tentu mengalami rintangan dan kendala, yang menjadi kendala utama pada saat awal adalah kurangnya data yang valid untuk mendukung proses persiapan dan perencanaan penanganan stunting, seiring berjalannya waktu, pemerintah Kabupaten Sumedang mulai stabil dalam penanganan dan penanggulangan stunting yang ada.

SARAN

Pemerintah Kabupaten Sumedang telah menunjukkan komitmen yang signifikan dalam penanggulangan dan penanganan stunting, dengan berbagai kebijakan dan program

yang berfokus pada perbaikan gizi, kesehatan ibu dan anak, serta peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan di tingkat desa. Berbagai langkah seperti pemberian makanan tambahan, peningkatan pendidikan gizi, dan penyuluhan kepada masyarakat telah diimplementasikan untuk mengurangi prevalensi stunting di wilayah tersebut. Namun, meskipun kebijakan tersebut sudah diterapkan, tantangan dalam pelaksanaannya tetap ada. Beberapa hambatan utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antar lembaga terkait, serta tingkat kesadaran masyarakat yang masih perlu ditingkatkan. Selain itu, faktor sosial dan ekonomi, seperti kemiskinan dan ketidaksetaraan akses terhadap pelayanan kesehatan, juga menjadi kendala utama dalam pencapaian hasil yang optimal.

Perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas kebijakan yang sudah dijalankan, serta penguatan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pencegahan stunting. Penekanan pada aspek pendidikan dan kesadaran gizi di kalangan masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di tingkat desa, sangat penting untuk mencapai penurunan prevalensi stunting yang signifikan di Kabupaten Sumedang. Dengan perbaikan tersebut, diharapkan Kabupaten Sumedang dapat lebih efektif dalam menanggulangi stunting dan menciptakan generasi yang lebih sehat dan produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, I. T. W., Rohayatin, T., & Wulandari, W. (n.d.). STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN JABAR ZERO NEW STUNTING DI KABUPATEN BANDUNG. <http://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/praxis/article/download/2325/582/>
- Akhmadi, M. H., & Pasaribu, I. T. (2020). Peran Belanja Negara dalam Program Penurunan Stunting. *JIAFE (Scientific Journal of Accounting Faculty of Economics)*, 6(2).
- BAB III GAMBARAN UMUM 3.1 Gambaran Umum Kota Sumedang Kabupaten Sumedang adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indones. (n.d.). repo unpas. Retrieved November 25, 2024, from <http://repository.unpas.ac.id/60157/7/HASIL%20SKRIPSI%20FARIDAH%20NUR%20FARDILA%20182020017-61-101.pdf>
- Helmyati. (2022, April 5). *Mengenal Stunting: Deteksi Dini, Dampak, dan Pencegahannya*. PUSAT KESEHATAN DAN GIZI MANUSIA UNIVERSITAS GADJAH MADA. <https://pkgm.fk.ugm.ac.id/2022/04/05/mengenal-stunting-deteksi-dini-dampak-dan-pencegahannya/>
- IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING SKRIPSI OLEH: LAMRIA SARI SITUMORANG 1. (n.d.). Repository UMA. Retrieved November 25, 2024, from <https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/21089/1/198520057%20-%20Lamria%20Sari%20Situmorang%20Fulltext.pdf>
- Isriawaty, F. S. (2015). *Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Doctoral dissertation, Tadulako University).

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (n.d.). *Keluarga Bebas Stunting*. InfoDATIN. https://kemkes.go.id/app_asset/file_content_download/17170399196657f32ff04cf3.76189362.pdf
- Manggala, T., Suminar, J. R., & Hafiar, H. (2021, Maret). Faktor-Faktor Keberhasilan Program Promosi Kesehatan “Gempur Stunting” Dalam Penanganan Stunting di Puskesmas Rancakalong Sumedang. *Journal of Strategic Communication*, 11(2). <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/coverage/article/download/2016/1173/>
- Nirmalasari, N. O. (2020). Stunting pada anak: Penyebab dan faktor risiko stunting di Indonesia. *Qawwam*, 14(1), 19-28.
- Parinata, D., & Puspaningtyas, N. D. (2022). Studi Literatur: Kemampuan Komunikasi Matematis Mahasiswa Pada Materi Integral. *Jurnal Ilmiah Matematika Realistik*, 3(2), 94-99.
- Pebriandi, P., Fatriansyah, A., Rizka, D., Indahsari, L. N., Yulanda, N. O., & Nurianti, N. (2023). Sosialisasi Pencegahan Stunting pada Masyarakat Desa Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. *ARRUS Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 53-57.
- Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Kesehatan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota | Hukum positif Indonesia*. (2023, November 13). *Hukum Positif Indonesia*. <https://rendratopan.com/2020/04/14/pembagian-urusan-pemerintahan-konkuren-bidang-kesehatan-antara-pemerintah-pusat-dan-daerah-provinsi-dan-daerah-kabupaten-kota/>
- Putri, A. A., & Hertati, D. (2023). Kolaborasi Model Pentahelix dalam Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Jombang. *Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah*, 5(3), 69-81.
- Rahmidini, A. (2020). LITERATUR REVIEW : HUBUNGAN STUNTING DENGAN PERKEMBANGAN MOTORIK DAN KOGNITIF ANAK. <https://ejournal.stikesrespatis-tsm.ac.id/index.php/semnas/article/download/272/192/457>
- Ramadhani, D. W., Setiawan, A., & Kushartono, T. (n.d.). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN PENURUNAN ANGKA STUNTING DI DESA SINDULANG KABUPATEN SUMEDANG. <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/praxis/article/view/2587/577>
- Rembulan, D. B., & Swaradesy, R. G. (n.d.). POTENSI LOKAL SENI BUDAYA DI SUMEDANG SEBAGAI DASAR PEMBUATAN KONTEN AUDIO VISUAL. <https://ojs.isbi.ac.id/index.php/Prosiding/article/download/3124/1746/7205>
- Safitri, R. A., Puspitasari, D., & Saputra, F. R. (2023, September). Dampak Lingkungan Stunting Dan Perekonomian. *Jurnal Hasil Karya Pengabdian Masyarakat*, 1(3). <https://journal.arimbi.or.id/index.php/Kegiatanpositif/article/download/318/306>
- Siregar, M. S. (2021). *PRINSIP-PRINSIP OTONOMI DAERAH INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH*. <https://etd.uinsyahada.ac.id/6551/1/1510300026.pdf>

El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Vol 5 No 1 (2025) 465 – 480 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736

DOI: 10.47467/elmujtama.v5i1.6328

Suparto. (n.d.). Otonomi Daerah Di Indonesia ; Pengertian, Konsep, Tujuan, Prinsip dan Urgensinya.

<https://repository.uir.ac.id/841/1/%2819%29%20PROSIDING%20SEMNAS%20UMRAH%20%28OTDA%202017%29%20.pdf>

Thamrin, A. (2019). Politik hukum otonomi daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di bidang kesehatan. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 4(1), 33-51.

Wifaqah, S. (2020). KEWENANGAN PEMERINTAHDAERAHDALAM PENGAWASAN ALAT KESEHATAN. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 3(1).
<https://ejournal.ipdn.ac.id/JKP/article/view/1039/660>